



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391

Vol. 2 No. 1 Juli 2020

Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



KEKUATAN POLITIK ORMAS (AMPHIBI) UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON AHYAR-MORI PADA KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Abd Hayyi¹, Hidayatullah², Amil³
^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 06-05-2020

Disetujui: 09-07-2020

Dipublikasikan : 21-07-
2020

Kata Kunci :

Organisasi Masyarakat,
pemilihan Kepala
Daerah, Kekuatan
Politik

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan sebagai upaya mendemokratisasikan kehidupan berbangsa-bernegara di tingkat lokal. Penumbuhan demokrasi tingkat lokal, merupakan ikhtiar untuk mencari pemimpin lokal yang memiliki legitimasi kuat, demokratis dan representatif. jika dilihat dari pengalaman berdemokrasi Indonesia dari sudut pandang pluralitas yang tampak merupakan pesta demokrasi yang sarat beban. Teori kekuatan politik yang digunakan untuk menjabarkan lebih jauh mengenai kekuatan politik Organisasi Masyarakat AMPHIBI dalam memenangkan paslon Ahyar-Mori dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah NTB tahun 2018. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Untuk Penelitian ini, penulis menggunakan *purposive sampling*. *Lobbying* yang dilakukan antara Ormas Amphibi dan Kandidat Paslon Ahyar-Mori bersifat *Lobbying* tradisional, yakni *lobbying* yang didasari dengan ikatan emosional dan ikatan kekeluargaan yang sudah lama di jalan antara TGH. Ahyar Abduh dengan dewan pendiri ormas Amphibi Alm. TGH. Sibawaihi Mutawalli.

POLITICAL STRENGTH OF ORMAS (AMPHIBI) TO WIN A pair of AHYAR-MORI CANDIDATES IN REGIONAL SELECTION CONTEST

Abstract

Regional Head Elections are also held as an effort to democratize the life of the nation at the local level. The growth of local-level democracy is an effort to find local leaders who have strong, democratic and representative legitimacy. A democratic experience which, when viewed from the plurality of the Indonesian state, appears to be a democratic party full of burdens. The theory of political power which then supports me in elaborating further on the political power of the AMPHIBI Community Organization in winning the Ahyar-Mori pair in the 2018 NTB Regional Election. In this study the authors will use a qualitative approach with descriptive analysis analysis methods. Descriptive analysis methods are used to get a systematic, factual and accurate picture of the facts, the characteristics and the relationship between the phenomena under investigation. For this study, the authors used purposive sampling. Lobbying conducted between Amphibi Community Organizations and Candidates for Candidate Ahyar-Mori is traditional lobbying, namely lobbying based on emotional ties and longstanding family ties on the road between TGH. Ahyar Abduh with the founding board of Amphibi Alm. TGH. Sibawaihi Mutawalli.

2020 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik_Ummat

*Alamat Korespondensi:

¹ abdhayyi@gmail.com

² dayatafaro@gmail.com

³ amil796@yahoo.co.id,

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian terpenting dari demokrasi di Indonesia, disamping pemilu Legislatif dan pemilu Presiden. Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi langsung dapat dipandang sebagai bagian dari tuntutan masyarakat tentang perlunya satu sistem pemerintahan yang memberi peran lebih besar kepada masyarakat di daerah, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang tidak lagi sentralistis. Harahap dalam Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada, mengatakan bahwa demokrasi adalah proses menuju peradaban yang lebih baik. Oleh karena itu membangun demokrasi berarti membangun peradaban itu sendiri. Dewasa ini demokrasi menjadi populer dan hampir diterima secara universal karena dianggap sebagai sistem politik yang baik dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi atau pemerintahan demokrasi berkaitan erat dengan faktor yang umum di kenal saat ini seperti adanya sistem perwakilan, pemilihan secara berkala, keterbukaan dan pengawasan sosial (*social control*) dari rakyat. Demokrasi juga dapat dikatakan sebagai “pemerintahan dari bawah”, pemerintah yang di kendalikan oleh rakyat, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Adapun yang di maksud dengan bawah disini adalah, ‘rakyat’ dalam hal ini adalah sebageaian besar atau mayoritas mempunyai suara untuk ikut menentukan serta mempengaruhi proses perumusan kebijakan pemerintah melalui saluran-saluran yang di sediakan pada tingkat infrastruktur politik.

Pemilihan Kepala Daerah juga dilaksanakan sebagai upaya mendemokratisasikan kehidupan berbangsa-bernegara di tingkat lokal. Penumbuhan demokrasi tingkat lokal ini, merupakan ikhtiar untuk mencari pemimpin lokal yang memiliki legitimasi kuat, demokratis dan representatif. jika dilihat dari pengalaman berdemokrasi Indonesia dari sudut pandang pluralitas, yang tampak merupakan pesta demokrasi yang sarat beban. Selain itu, Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana kontestasi dalam memperebutkan kekuasaan dan legitimasi politik lokal, dan untuk meningkatkan partisipasi politik ditingkat lokal, legitimasi politik dapat memberikan dampak ikatan yang kuat terhadap kepemimpinan daerah terpilih. Pilkada sebagai ruang untuk kompetisi secara adil antar calon yang bersaing melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih optimal. Baik pada tahapan berlangsungnya pemilihan hingga proses politik paska pemilihan

Kenyataannya tidak semata-mata calon gubernur dan wakil gubernur hanya mengandalkan proses pemilihan secara struktural seperti kampanye-kampanye yang dilakukan. Para calon tersebut juga mengandalkan mobilisasi politik untuk kepentingan pemilihan. Tidak hanya melalui atau menggunakan partai politik namun juga melalui

instrumen mobilisasi politik non-partai. Pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 di Nusa Tenggara Barat (NTB), tak sedikit para kandidat yang berkontestasi menggunakan kekuatan mobilisasi Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan merupakan kelompok yang secara organisatoris membentuk suatu perkumpulan secara formal yang di atur berdasarkan ketentuan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam bidang sosial budaya, dan termasuk dalam kategori Organisasi Kemasyarakatan biasanya meliputi organisasi ekonomi dengan tujuan memperoleh kesejahteraan bagi kelompok anggotanya. Kendati Organisasi Kemasyarakatan tidak melibatkan dirinya dalam proses politik, tetapi Organisasi Kemasyarakatan tetap dikategorikan sebagai salah satu kekuatan politik dan merupakan salah satu bagian dari subsistem politik (Setiadi dan Kolip , 2001 : 41-42)

Pemilihan Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018, berbagai nama Organisasi Kemasyarakatan mulai bermunculan, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Salah satunya adalah Organisasi Kemasyarakatan Amphibi yang berpusat di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, yang kemudian menjadi objek dalam penelitian ini. Adanya relasi atau hubungan yang terjalin antara pengurus ataupun anggota organisasi masyarakat dengan elit yang ada didalam pemerintahan memunculkan satu hubungan yang menyebabkan organisasi kemasyarakatan tidak berjalan sesuai dengan visi misi yang menjadi dasar terbentuknya organisasi masyarakat tersebut.

Berbagai fenomena yang terjadi didalam proses pemilihan Gubernur NTB, seperti dukungan dari berbagai LSM dan Organisasi Kemasyarakatan disetiap kandidat untuk mengusung “Jagoannya” untuk menjadi Gubernur NTB. Begitu banyak Ormas-ormas yang ikut berperan serta dalam “Pesta Demokrasi”. Sebut saja beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi kekuatan politik non-partai seperti Nahdatul Wathan yang mengusung pasangan Zul-Rohmi, YATOFA yang mengusung pasangan Suhaili-Amin, dan AMPHIBI yang mengusung dan bertekad memenangkan pasangan Ahyar-Mori dalam kontestasi Pilkada 2018.

Organisasi Kemasyarakatan tidak bisa lepas dari seorang tokoh sentral atau tokoh informal yang menjadi salah satu kekuatan politik untuk memenangkan sebuah kontestasi politik. Tokoh informal ini tentu saja sudah memiliki *track record* yang mumpuni, sehingga mampu menghegemoni masyarakat. Tokoh-tokoh informal yang sekaligus menjadi pendiri ataupun seorang ketua dari Organisasi Kemasyarakatan menciptakan pengaruhnya melalui gerakan-gerakan sosial seperti bidang pemberdayaan, bidang keamanan, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan lain-lain.

Setelah melakukan pertimbangan, Organisasi Kemasyarakatan AMPHIBI berafiliasi sekaligus berkomitmen memenangkan Pasangan Ahyar-Mori pada Pilgub 2018 lalu. Salah satu alasan Organisasi Kemasyarakatan AMPHIBI berafiliasi pada pasangan Ahyar-Mori adalah adanya hubungan atau ikatan emosional yang kental antara dewan pendiri Organisasi Kemasyarakatan AMPHIBI dengan ayahanda dari Ahyar Abduh yang sampai saat ini hubungan tersebut tetap dirawat dan dijaga dengan baik. Adapun kekuatan politik yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan AMPHIBI adalah, *Pertama*, kekuatan Tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat baik dari tokoh agama, tokoh adat, dan budaya. Tokoh-tokoh informal ini di harapkan mampu menjadi strategi jitu untuk mendulang suara dalam kontestasi pilukada. *Kedua*, kekuatan kesejarahan atau secara historis yang masih melekat dengan kultur masyarakat bahkan menjadi doktriner sebagian masyarakat yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur (Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra dan Sikur), Kabupaten Lombok Tengah (mayoritas desa-desa di Kecamatan Praya Timur) maupun Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Sekotong dan sekitarnya). Ormas AMPHIBI mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon Gubernur Ahyar-Mori kurang lebih satu bulan menjelang pemilihan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan meneliti sekaligus membahas kiprah ormas Amphibi dalam kontestasi pilkada NTB 2018 lalu dengan Judul, “Kekuatan Politik Ormas Amphibi dalam Memenangkan Paslon Ahyar-Mori pada Pilkada NTB 2018. Walaupun “kekuatan” dan “kekuasaan” sering di pakai dalam arti yang sama, namun sebagian besar analis menganggap kekuasaan sebagai konsepsi yang lebih luas dan melihat kekuatan sebagai suatu bentuk kekuasaan yang lebih dalam dengan berbagai aspek yang mendukungnya. Selanjutnya definisi dari kata “politik” menimbulkan beraneka ragam akan definisinya. kata politik berasal dari Yunani “polis” adalah kota yang berstatus Negara/Negara kota. seperti yang di kemukakan oleh Arifin Rahman bahwa politik adalah segala aktifitas yang di jalankan oleh Polis untuk kelestarian dan perkembangannya di sebut “*politeke techne*”/politika (Arifin 2002).

Sedangkan pengertian politik menurut Miriam Budiarjo adalah segala aktifitas yang dilakukan dalam suatu sistem politik atau Negara yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu, disamping bagaimana cara mewujudkan tujuan-tujuan tersebut (Budiarjo, 2002.). Mengamati suatu tindakan yang sifatnya politis, maka harus mencakup proses dimana sekelompok manusia menggunakan kekuatan atas orang lain atau berusaha agar ideologinya berlaku pula atas orang lain. Selain itu ada pula ungkapan menyatakan : politik adalah perjuangan mengangkat penguasa yang berfungsi menetapkan kebijaksanaan

pemerintah. walaupun arti ini telah menunjukkan arti yang berbeeda antara aktifitas politik dan non-politik, tetapi belum menyentuh sasaran secara tuntas kegiatan-kegiatan yang non-pemerintahan

Tingkat kesatuan politik yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat pada hakikatnya mencerminkan kaitan antara lembaga politik dan kekuatan-kekuatan sosial yang membentuknya. kekuatan sosial adalah kelompok etnis, keagamaan, tentorial, ekonomis atau status. Pada dasarnya modernisasi melibatkan peningkatan jumlah dan keanekaragaman kekuatan sosial di dalam masyarakat. tetapi suatu organisasi politik ialah suatu sarana peraturan untuk mempertahankan kekuasaan, menyelesaikan perselisihan, memilih tokoh-tokoh pemimpin yang memiliki wibawa.

Teori kekuatan politik yang kemudian mendukung saya dalam menjabarkan lebih jauh mengenai kekuatan politik Organisasi Masyarakat Amphibi dalam memenangkan paslon Ahyar-Mori dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah NTB tahun 2018. Kekuatan-kekuatan politik yang dimaksud adalah bertitik tolak dari analisis sistem politik (teori struktur-fungsi) yang di kemukakan oleh Gabriel A. Alomond (1980), bahwa dalam sistem politik, terdapat struktur-struktur politik atau lembaga-lembaga politik yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu demi berjalannya proses politik.

Teori ini bertitik tolak dari asumsi dasar, bahwa dalam sistem politik terdapat fungsi-fungsi yang harus ada demi kelangsungan hidup sistem politik itu sendiri. Fungsi-fungsi yang dimaksud dalam sistem politik adalah input dan fungsi output, studi ini memusatkan pada perhatian pada fungsi input yang terdapat di dalam struktur politik (infrastruktur politik) seperti misalnya partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan lain-lain (Loomis 2011 :184). Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Kekuatan-kekuatan politik berperan sebagai penopang sistem politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan (Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Vol, 15, 2016)

Kekuatan-kekuatan politik suatu negara berbeda dengan kekuatan politik negara lain, tergantung corak sistem politik yang di gunakan. Teori kekuatan politik terbagi menjadi dua teori yaitu, teori kekuatan *Patriachaal* dan *Patrimonial*, yaitu adanya kelompok yang berkedudukan yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat, di dalam teori kekuatan politik *Patrichaal* menunjukkan bahwa pemerintah dalam suatu daerah merupakan orang yang kuat dalam arti berpengaruh karena berjasa dalam sikap bagi semua warganya. Sedangkan teori kekuatan *Patrimonial* adalah berdasarkan kepemilikan, bahwasanya seseorang atau

kelompok tertentu yang memiliki kekuatan yang akan menduduki kekuasaan. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan fisik, materi maupun politik (Roy Natsir, 2013).

Secara sederhana, kelompok kepentingan merupakan suatu kumpulan individu-individu ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan yang dapat dipertahankan demi terciptanya kelangsungan hidup setiap warga negara, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun negara dalam rangka mencapai dan mempertahankan sebuah kepentingan, tentu saja memerlukan sebuah usaha, kerja keras, dan sebuah perjuangan yang semuanya saling bersentuhan antar individu atau masyarakat. Untuk itu semua sangat diperlukan kekuatan dan motivasi maupun dukungan dari berbagai pihak sehingga diperoleh tanggapan yang baik dari masyarakat dan kelompok atau pihak-pihak tertentu menjadi tujuan dari sebuah kepentingan.

Organisasi yang terbentuk dari dan mengupayakan mengatasnamakan dirinya sebagai organisasi kepentingan, merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), *Non Government Organisation* (NGO), Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), dan organisasi sosial lainnya. Lahirnya kelompok kepentingan ini karena adanya dominasi individu masyarakat, negara, maupun negara lain, baik yang telah berkembang maupun yang terbelakang dapat membahayakan kelangsungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara umum kelompok kepentingan hampir sama dengan sebuah partai politik, kesamaannya terletak pada katalisator penghubung antara pemerintah dan yang diperintah.

Kelompok kepentingan lebih kepada sekelompok individu yang mengadakan suatu persekutuan yang didorong oleh sebuah kepentingan-kepentingan yang dapat mempengaruhi suatu kelompok tertentu. Kepentingan dapat berupa kepentingan umum, masyarakat luas dan sekelompok kepentingan tertentu (Jurnal Arfan Ashari Saputra, *Kelompok Kepentingan dan Gerakan Sosail Baru dalam Proses Kebijakan Politik*, Magister Ilmu Pemerintahan, UMY).

Kelompok kepentingan seringkali di definisikan sebagai, *a group of persons who share a common cause, wich puts then into political competation with orther groups of interest* (Bendit 1975:34). Pada definisi tersebut, kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintah (Janda, Berry, dan Goldman 1997). Kelompok kepentingan seringkali dikonotasikan secara negatif oleh kalangan awam yang sering mengasosiasikan kelompok kepentingan dengan oligharki dalam politik. Definisi kelompok kepentingan (*interst group*) sendiri ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam mengorganisasikan diri untuk melindungi dan

mencapai tujuannya. Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik dan kelompok penekan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif . Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Untuk Penelitian ini, penulis menggunakan *purposive sampling*. Dengan teknik pengumpulan data yaitu; Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan oleh penulis adalah Reduksi Data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) AMPHIBI di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Penulis memilih lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.

Tabel 1
Sumber Data Primer

N0	Narasumber	Jenis Data	Metode	Jumlah
1	Ketua Amphibi	Interaksi Amphibi dengan eksekutif dan Legislatif daerah	Wawancara	1 orang
2	Sekretaris Amphibi	Isu-isu yang dibangun oleh Amphibi melalui media massa	Wawancara	1 orang
3	Anggota Amphibi	Interaksi anggota Amphibi dalam membangun loyalitas Grass-root pressure	Wawancara	20 orang
4	Elite Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Interaksi Amphibi dengan Elite Politik Partai Demokrasi	Wawancara	1 orang

		indonesia Perjuangan		
--	--	----------------------	--	--

Sumber: Data diolah penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lobi merupakan aktifitas yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan cara mempengaruhi serta mempersuasi sehingga tujuan serta kebutuhan pihaknya terpenuhi. Menurut Sursanto, seorang konsultan manajemen, melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak lain yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik pelobi dengan demikian diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan.

Dalam Kontestasi Pilkada NTB 2018, Ormas Amphibi yang di Pimpin Oleh TGH. Saiful Islam Lc, MA berafiliasi dan berkomitmen memenangkan paslon Ahyar-Mori dalam kontestasi pilkada tersebut. Hal ini terjadi tentu melalui proses *Lobbying* yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Menurut Ketua Ormas Amphibi TGH. Saiful Islam Lc, Ma “Lobbying ini berawal dari keinginan kandidat untuk berafiliasi dengan ormas Amphibi dalam rangka mendapatkan dukungan politik pada suksesi NTB 1, Kekuatan masa Amphibi ketika itu belum maksimal akibat vacuumnya kepengurusan pusat oleh adanya perubahan bentuk kelompok dari yayasan menjadi ormas”. Ormas Amphibi bergabung menjadi bagian dari mesin politik untuk kandidat paslon Ahyar-Mori tidak serta merta mendapat dukungan mayoritas anggota, dan hal tersebut dikarenakan oleh pecahnya beberapa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang terlebih dahulu memberikan dukungan terhadap paslon lain. Bergabungnya Amphibi dengan kandidat Paslon Ahyar-Mori tidak berdasarkan transaksional melainkan mengharapkan partisipasi anggota yang loyalitas setelah adanya kepengurusan baru di Internal Amphibi.

Berdasarkan argumen ketua ormas Amphibi tersebut, *lobbying* pertama kali dilakukan oleh kandidat paslon Ahyar-Mori melalui tim suksesnya. *Lobbying* terjadi dengan pertimbangan kedekatan emosional dan kultural, yang sudah lama terjalin, selain itu berafiliasinya ormas Amphibi kepada paslon Ahyar-Mori untuk mengukur tingkat loyalitas anggota yang sudah memberikan dukungan kepada paslon lain.

Berafiliasinya ormas Amphibi kepada paslon Ahyar-Mori menyebabkan terjadinya perbedaan pilihan dengan anggota-anggota Amphibi yang sudah lebih dahulu menyatakan dukungannya kepada paslon lain. Awalnya, ketua Ormas Amphibi menyatakan sikap netral atau tidak berafilias kepada paslon-paslon yang ikut berkontestasi pada pilkada NTB 2018.

Namun beberapa hari menjelang pencoblosan ketua Ormas Amphibi mengeluarkan surat deklarasi untuk mendukung paslon Ahyar-Mori”.

“Menurut Ketua Ormas Amphibi TGH. Saiful Islam Lc, MA “Terjadinya lobbying kandidat kepada ormas Amphibi 15 hari sebelum dilakukannya pencoblosan pada Pilkada 2018. Sebenarnya kandidat sudah beberapa kali mengunjungi kami untuk meminta ormas Amphibi berafiliasi dan memenangkan Paslon pada Kontestasi Pilkada 2018. Setelah memikirkan berbagai pertimbangan, dan setelah mendapat izin dari Dewan Pembina, kemudian kami mengeluarkan surat deklarasi dukungan kepada paslon Ahyar-Mori”.

Ketua ormas Amphibi dan fungsionaris Amphibi sudah memprediksi perbedaan dukungan tersebut akan terjadi. Alasan kuat ormas Amphibi tetap berafiliasi dengan paslon Ahyar-Mori adalah sebagai parameter untuk mengukur tingkat loyalitas dan komitmen anggota-anggota ormas Amphibi setelah bertransisinya Amphibi dari yayasan ke organisasi kemasyarakatan.

Di dalam internal Ormas Amphibi ada beberapa anggotanya yang menjadi kader dan elit dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P). Walaupun dalam internal ormas Amphibi ada beberapa elit Partai Demokrasi Indonesia (PDI-Perjuangan), namun tidak ada lobbying yang dilakukan oleh ormas Amphibi itu sendiri, hal ini dikarenakan internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI-Perjuangan) memiliki strategi tersendiri sebagai partai koalisi yang mendukung paslon Ahyar-Mori untuk suksesi pilkada NTB 2018.

Menurut salah satu elite Partai Demokrasi Indonesia (PDI-Perjuangan) yang sekaligus menjadi anggota dari ormas Amphibi yakni bapak Muhammad Rifa’i mengatakan “Ketua ormas Amphibi ataupun kader PDI-P yang juga menjadi anggota ormas Amphibi tidak pernah melakukan lobbying terkait dengan akomodasi. Sebagai kader PDI-P, kami memiliki strategi sendiri untuk memenangkan paslon Ahyar-Mori sesuai dengan intruksi dari pimpinan-pimpinan kami. Hal ini dikarenakan PDI-P merupakan salah satu partai yang berkoalisi dalam memenangkan paslon Ahyar-Mori. Kami hanya ikut serta melakukan sosialisasi dan konsolidasi kepada anggota-anggota ormas Amphibi”.

Elit Partai Demokrasi Indonesia (PDI-Perjuangan) yang menjadi anggota dari ormas Amphibi memiliki tanggung jawab kepada internal partainya dalam hal strategi pemenangan paslon Ahyar-Mori. Ormas Amphibi hanya melakukan lobbying dengan kandidat paslon Ahyar-Mori untuk menjadi tim pemenangan dalam kontestasi pilkada NTB 2018 . Menurut Ketua Umum ormas Amphibi TGH. Saiful Islam Lc, MA “Sebagai tim pemenangan paslon Ahyar-Mori kami hanya di fasilitasi dengan finansial sebagai dana kampanye yang

merupakan bagian dari akomodasi yang di berikan, adapun dana yang diberikan sebesar 9 juta Rupiah untuk biaya distribusi alat peraga kampanye dan sebagai modal untuk melakukan sosialisasi dan konsolidasi terhadap anggota Amphibi Itu sendiri”

Lobbying yang terjalin antara paslon Ahyar-Mori dan ormas Amphibi adalah lobbying yang bersifat tradisional, yakni lobbying yang dilakukan berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan kultural. Lobbying itu sendiri tidak bersifat transaksional dan adanya deal-deal politik yang bersifat khusus.

Namun, walaupun enam partai yang mengusung paslon Ahyar-Mori pada Pilkada NTB 2018, sebagai tim pemenangan yang bersifat kelompok kepentingan, ormas Amphibi tidak melakukan lobbying terkait dengan pengakomodiran sebagai tim kampanye dan tim pemenangan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan konsolidasi kepada massa ormas Amphibi ke partai-partai koalisi tersebut. Hal ini di sebabkan karena partai koalisi memiliki strategi untuk melakukan pemenangan yang sudah di atur dalam internal partai.

Media massa mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan kognisi seseorang. Media memberikan informasi dan pengetahuan pada akhirnya akan dapat membentuk persepsi. Dan persepsi mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Berbagai pemberitaan media memberikan masukan kepada kognisi individu, dan kognisi akan membentuk sikap. Cara-cara media menampilkan peristiwa-peristiwa politik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan aktor politik mengenai perkembangan politik. Keikutsertaan media dalam mengubah sistem politik dengan melalui pembentukan opini publik atau pendapat umum yakni, upaya pembentukan sikap dan tindakan khalayak mengenai sebuah masalah politik atau aktor politik.

Dewasa ini, media massa juga menjadi salah satu kekuatan politik kelompok kepentingan untuk menyampaikan isu-isu tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mempengaruhi opini sekaligus perilaku politik masyarakat itu sendiri. Namun sebagai kelompok kepentingan, ormas Amphibi tidak memanfaatkan peran dari media massa untuk menyampaikan isu-isu atau pesan-pesan tertentu yang bersifat politis dalam kontestasi pilkada NTB 2018.

Menurut Sekretaris ormas Amphibi yakni Ahmad Turmuzi “Untuk media massa kami tidak memuat isu-isu dan pesan-pesan tertentu yang berkenaan dengan dukungan politik terhadap paslon Ahyar-Mori. Dengan beberapa pertimbangan yakni situasi masa transisi organisasi yang saat itu dianggap belum siap berada di jalur politik, kemudian dalam rangka menjaga stabilitas pengurus di berbagai tingkatan yang sudah terlanjur berafilias dengan paslon lain, kemudian limit waktu organisasi berafilias dengan paslon Ahyar-Mori

memungkinkan untuk tidak melakukan manuver apapun yang berkenaan dengan pemenangan paslon Ahyar-Mori yang di perkirakan akan berdampak pada kegiatan konsolidasi yang sedang berlangsung lebih-lebih Pilkada NTB serentak dengan Pilkada Lombok Timur dimana salah satu fungsionaris dengan pimpinan pusat Amphibi terdaftar sebagai salah satu kontestan Pilkada Lombok Timur yang tidak kami nyatakan dukungan secara organisatoris pada calon tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris ormas Amphibi tersebut, alasan ormas Amphibi tidak menggunakan peran media massa dalam menyampaikan isu-isu terkait dengan pilkada 2018 adalah menjaga stabilitas pengurus ormas Amphibi di berbagai tingkatan yang sudah terlanjur memberikan dukungan kepada paslon lain, kemudian singkatnya waktu ormas Amphibi berafiliasi dengan paslon Ahyar-Mori yang tidak memungkinkan melakukan gerakan secara massif dan opensif. Hal ini juga yang mempengaruhi kekuatan politik yang dimiliki oleh ormas Amphibi tidak begitu kuat dalam proses sosialisasi dan konsolidasi paslon Ahyar-Mori pada kontestasi pilkada 2018.

Namun pernyataan dari Sekretaris Amphibi tersebut, berbeda dengan berita-berita yang di tulis oleh media-media online. Adapun media online yang memberitakan ormas Amphibi ikut mendukung paslon Ahyar-Mori pada Pilkada NTB 2018 sebagai berikut :

Tabel 2

Pemberitaan Media Massa Tentang Dukungan Amphibi Terhadap Paslon Ahyar-Mori

No	Nama Media	Judul Berita	Isi Berita
1	Lombok Post.Net	Amphibi Dukung Ahyar-Mori	Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas Amphibi melalui surat istruksinya tertanggal 11 Juni 2018 Nomor 011/DPP-AMP/VI/2018 yang di tanda tangini oleh ketua DPP dan Sekretaris ormas Amphibi menginstruksikan kepada DPD, DPK dan seluruh jajaran

			kepengurusan Amphibi untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam memenangkan paslon Ahyar-Mori
2	Suara NTB.com	Dukungan Terus Mengalir, Relawan Ahyar-Mori Kawal Ketat Perolehan Suara	Dukungan dari Amphibi cukup memberikan angin segar karena banyak masyarakat yang pilihannya mengambang, kini semakin yakin untuk secara serentak mendukung paslon Ahyar-Mori
3	Liputan 6.com	Ini Empat Paslon Yang Akan Bertarung Dalam Pilgub NTB	Dari media online Liputan 6.com tidak memberitakan tentang dukungan ormas Amphibi kepada Paslon Ahyar-Mori
4	Kumparan.com	Pilgub NTB, Ratusan Aktivistis Deklarasi Dukung Ahyar-Mori	Dari media online Kumparan.com tidak memberitakan tentang dukungan ormas Amphibi kepada Paslon Ahyar-Mori

(Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2019)

Berdasarkan data dari Tabel di atas, dua dari empat media online tersebut memberitakan tentang ormas Amphibi dalam mendukung paslon Ahyar-Mori pada pilkada 2018. Meskipun ormas Amphibi tidak memiliki wadah atau media tersendiri dalam memberitakan deklarasi dukungannya kepada paslon tersebut, namun media online Lombok Post.Net dan Suara NTB.com memberitakan deklarasi dukungan tersebut.

Alasan kedua media online tersebut memberitakan deklarasi dukungan ormas Amphibi dikarenakan kesejarahan dan ketokohan dari para pendiri ormas Amphibi yang kharismatik serta ormas Amphibi telah banyak memberikan kontribusi terhadap masyarakat khususnya dalam bidang keamanan di pulau Lombok.

Grassroot Pressure atau lebih familiar disebut dengan gerakan akar rumput adalah kalangan yang berasal dari struktur bawah (*bottom*) negara yakni kalangan menengah ke bawah namun potensial secara politik dan dianggap otonom. Kalangan ini dianggap sebagai antitesis elit negara (*top*) yang dekat dengan kekuasaan serta sifat dan godaan. Bahkan gerakan akar rumput sejatinya tidak hanya secara momentum belaka. Lebih dari itu, rakyat harus senantiasa aktif dan kritis untuk mengawasi dan menilai kebijakan yang dijalankan.

Dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, kelompok kepentingan biasanya menggunakan *Grassroot Pressure* atau gerakan akar rumput untuk menggalang dukungan masyarakat lapis bawah untuk menyampaikan isu-isu tertentu. Hal ini biasanya dilakukan melalui rapat-rapat akbar, pawai-pawai massal, demonstrasi dan lain-lain. Melalui cara ini memang ada kontak langsung dengan pejabat pemerintah, tetapi terbatas, dan mungkin saja manipulatif dan situasional. Sebagai kelompok kepentingan, ormas Amphibi juga menggalang masyarakat lapis bawah untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan pada kontestasi pilkada NTB 2018.

Menurut salah seorang anggota Amphibi yakni saudara Tajalli S.IP “Terkait dengan dukungan masyarakat lapis bawah ada dua dikotomi persepsi yang membelah keikutsertaan dalam memberikan dukungan dimana dalam satu sisi TGH. Saiful Islam Lc, MA menjadi ketua umum yayasan Darul Yatama Wal Masakin Desa Jerowaru, disisi lain Beliau menjadi Ketua Umum Ormas Amphibi. Sehingga dalam Implementasi arah kebijakan garis perjuangan kedua institusi berbeda berdasarkan tupoksi yang telah di tetapkan melalui dua mekanisme institusi, terhadap kebijakan beliau sebagai ketua umum yayasan Darul Yatama Wal Masakin lebih kepada pembinaan kultural yang tidak melibatkan yayasan masuk kedalam sistem politik praktis, sehingga jamaah yayasan darul yatama wal masakin tidak diarahkan memilih salah satu paslon, kemudian implementasi kebijakan sebagai ketua umum ormas Amphibi lebih kepada pembinaan struktural yang bersifat pada pengkayaan kelembagaan untuk dapat berkontribusi membangun provinsi NTB melalui sistem politik, akan tetapi masih terkesan tradisional”.

Menurut hasil wawancara dengan salah seorang anggota Amphibi tersebut maka dengan dua dikotomi tersebut, ketua Ormas Amphibi berusaha membangun partisipasi masyarakat dan menggalang dukungan masyarakat lapis bawah melalui dua lembaga yang

berbeda, yakni lembaga yayasan Darul Yatama Wal Masakin, yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah, panti asuhan, panti jompo dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Melalui kelembagaan ini, ketua ormas Amphibi fokus membangun ikatan kultural dengan masyarakat dan tidak melibatkan kelembagaan ke ranah politik praktis.

Namun demikian, lembaga tersebut secara tidak langsung memberikan pengaruh dan *power* dalam menggalang dukungan masyarakat lapis bawah terhadap kebijakan politisnya sebagai ketua ormas Amphibi dalam kontestasi pilkada NTB 2018. Dengan berafiliasinya ormas Amphibi kepada paslon Ahyar-Mori. Adapun cara yang di gunakan untuk menarik simpati masyarakat adalah melaksanakan peringatan hari jadi yayasan yang di rangkai dengan pengajian akbar. Tabel berikut ini akan menjelaskan tentang pola dukungan dari massa ormas Amphibi terkait berafiliasinya ormas Amphibi kepada paslon Ahyar-Mori.

Tabel 3

Pola Dukungan Massa Amphibi Terhadap Deklarasi Mendukung Paslon Ahyar-Mori

No	Nama	Mendukung	
		Ya	Tidak
1	Tajalli S.IP	✓	
2	Sapri	✓	
3	Mahnum	✓	
4	Khairuddin		✓
5	Dedi Irawan		✓
6	Khusnawalli	✓	
7	Badri		✓
8	Mustamin		✓
9	Heri Jayadi	✓	
10	Muliadi		✓
11	Supriadi	✓	
12	L. Will Hendrawan		✓
13	Joyo Supeno		✓
14	Abd. Mutialli		✓
15	M. Saleh	✓	

16	Multazam	✓	
17	Yayan Sutangga	✓	
18	Furqon Fajri	✓	
19	Huliyah	✓	
20	Bq. Sumaini	✓	
Prsentase		60%	40%

(Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2019)

Berdasarkan presentase dari tabel di atas, maka 60 % dari masa ormas Amphibi yang penulis wawancara mendukung keputusan dari ketua Ormas Amphibi dalam mendukung paslon Ahyar-Mori pada pilkada 2018. Hal ini juga menunjukkan bahwa, dukungan masyarakat lapis bawah kepada ormas Amphibi cukup partisipatif di karenakan loyalitas dari anggota tersebut masih tinggi setelah ormas Amphibi bertransformasi menjadi ormas itu sendiri.

Perpecahan ini disebabkan karena limitnya waktu ormas Amphibi saat melakukan deklarasi dukungan kepadapaslon Ahyar-Mori. Sedangkan DPD dan anggota Amphibi yang lainnya sudah memberikan dukungan kepada paslon lain dengan argumen dasar bahwa sikap politis awal dari ketua ormas Amphibi yang memilih netral atau tidak berafiliasi kepada salah satu paslon yang ikut dalam kontestasi pilkada NTB 2018.

PENUTUP

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis disini menarik beberapa kesimpulan terkait dengan Kekuatan Politik Ormas Amphibi Dalam Memenangkan Paslon Ahyar-Mori Pada Pilkada NTB 2018, antara lain, Pertama Lobbying yang dilakukan antara Ormas Amphibi dan Kandidat Paslon Ahyar-Mori bersifat Lobbying tradisional, yakni lobbying yang didasari dengan ikatan emosional dan ikatan kekeluargaan yang sudah lama di jalan antara TGH. Ahyar Abduh dengan dewan pendiri ormas Amphibi Alm. TGH. Sibawaihi Mutawalli. Sedangkan ormas Amphibi tidak pernah melakukan lobbying dengan elit partai PDI-P yang sekaligus menjadi anggota ormas Amphibi, dikarenakan elit partai PDI-P memiliki tanggung jawab kepada internal partai sebagai konsekuensi partai koalisi yang mendukung paslon Ahyar-Mori pada kontestasi pilkada NTB 2018, Kedua Ormas Amphibi tidak menggunakan peran media massa sebagai alat untuk menyampaikan isu-isu strategis dan pesan-pesan mengenai pilkada, hal ini disebabkan oleh limitnya waktu berafiliasinya ormas Amphibi kepada paslon Ahyar-Mori, sehingga manuver-manuver politik tidak

memungkinkan untuk dilakukan. Namun beberapa media massa online yakni Lombok Post.Net dan Suara NTB.com memberitakan deklarasi dukungan Amphibi kepada paslon Ahyar-Mori. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara kelembagaan Amphibi tidak memiliki media atau keterbatasan sumber daya untuk memediakan deklarasi dukungannya tersebut, namun sebagai subjek ormas Amphibi mampu di sorot oleh media karena deklarasi dukungan tersebut. Ketiga, Dalam menggalang dukungan masyarakat lapis bawah, ormas Amphibi memanfaatkan lembaga yayasan Darul Yatama Wal Masakin untuk membangun ikatan kultural serta mempengaruhi simpati masyarakat untuk ikut serta dan mendukung kebijakan politik ketua ormas Amphibi dalam mendukung paslon Ahyar-Mori pada Kontestasi Pilkada NTB 2018.

Adapun saran yang penulis sampaikan sebagai berikut, Pertama Seharusnya ormas Amphibi lebih cepat memutuskan untuk melakukan afiliasi dan menyatakan sikap untuk mendukung salah satu paslon, agar stabilitas internal ormas tetap terjaga dan tidak menimbulkan perpecahan karena perbedaan dukungan diantara pengurus pusat dan masing-masing DPD (Dewan Pimpinan Daerah) yang terlebih dahulu sudah menyatakan dukungan untuk mendukung salah satu paslon. Selain itu mungkin manuver politik yang dilakukan akan lebih terstruktur, sistematis dan efektif sebagai tim pemenangan dalam pilkada NTB 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Ashari, Kelompok Kepentingan dan Gerakan Sosial Baru Dalam Proses Kebijakan Politik, Magister Ilmu Pemerintahan, UMY.
- Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia : Dalam Persepektif Struktural Fungsional, Surabaya, 2002
- Almond, Gabriel and Powell, Bingham. *Comparative Politics: A Developmental Approach*, Boston, MA : Little, Brown and Co, 1980.
- Bendit, Theodore M, "The Concept of Interest in Political Theory", *Political Theory*, No. 3, August 1975 .
- Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia, 2002. Hal 3.
- Cummings, Wise, *Democracy Under Pressure : An Introduction To The American Political System*, New York, NY : Harcourt Brace Jovanovich, Inc, 1981.
- Djarwanto (1998 : 34) Dalam Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian*, 2006.
- Gaffar. J.M. 2012. Politik Hukum Pemilu, Jakarta:Konstitusi Pres

- Hays, Michael T, "Interest Groups : Pluralism or Mass Society", in Allan J. Cigler, and Burdet A. Loomis (eds), *Interest Group Politics*, Washington, D.C : CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. 2011.
- Janda K. Berry, J, and Goldman J, *The Challenge of Democracy*, Boston : Houghton Mifflin, 1997.
- Heywood A. (2013). Politik: Edisi ke-4 : tej. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Politik Jehdi dan Kolip (2001:41-42), Duverger (1984 :123), Setiadi dan Kolip (2001:41-42), Jordan dan Malanoey (2007:39-40), Bachiar Effendy (1993:241), Horwitz (2014) Dalam Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol 15, Nomor 2 April 2016.
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Metodologi Penelitian pendidikan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Lianto Gratina dan Wahyuni Pudjiastuti, *Strategi Lobi dan Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Penyelenggaraan Miss World 2013 di Indonesia*, Makalah Non Seminar, Universitas Indonesia, 11 Desember 2014
- Natsir Roy, *Kekuatan Politik Dany Lovato dan Syamsul Rizal Dalam Pemilihan Walikota Makassar*, 2013
- Ridwan (2008 : 69) , Dalam Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 2005)
- Satori Djam'an dan Aan Komariah, Dalam Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian*, 2006.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006
- Sugiyono, 2013. Dalam Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras, 2011.